

**SIKAP PENYULUH PERTANIAN TERHADAP PEMANFAATAN
IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DALAM PENYALURAN
PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN MAROS**

*THE ATTITUDE OF AGRICULTURAL EXTENSION WORKERS TOWARD
THE USE OF DIGITAL POPULATION IDENTITY IN THE DISTRIBUTION OF
SUBSIDIZED FERTILIZER IN MAROS REGENCY*

Abdul Halim¹⁾, Muhammad Faisal²⁾, Khairunna Istiqamah Halim³⁾

^{1),2)}Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan ³⁾Politeknik STIA LAN Makassar.
Email: abdulhalim@ipdn.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis sikap penyuluh pertanian terhadap pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Maros. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif, dengan kuesioner sebagai instrumen utama. Besarnya sampel 66 orang penyuluh pertanian yang berdomisili di Kabupaten Maros, dipilih secara *purposive sampling*. Analisis data menggunakan aplikasi SPSS for windows 23, mencakup analisis korelasi *Rank Spearman* dan uji beda *Mann-Whitney U Test*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) faktor-faktor pembentuk sikap penyuluh pertanian antara lain: pengalaman responden, pengaruh orang yang dianggap penting, dan terpaan media massa termasuk kategori rendah sampai sedang, pendidikan formal termasuk kategori tinggi, dan pendidikan non-formal termasuk kategori rendah; (2) penyuluh pertanian menyatakan sikap setuju terhadap pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi, baik pada saat pendataan petani calon penerima alokasi pupuk bersubsidi maupun verifikasi dan validasi data petani saat penebusan pupuk bersubsidi; (3) pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting, dan terpaan media massa tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan sikap penyuluh pertanian terhadap pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi, pendidikan formal dan pendidikan non-formal memiliki hubungan yang signifikan dengan sikap penyuluh pertanian terhadap pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi; (4) tidak terdapat perbedaan sikap terhadap pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi antara penyuluh pertanian yang memiliki usia tergolong adaptif teknologi digital dengan penyuluh pertanian yang memiliki usia tergolong tidak adaptif teknologi digital, terdapat perbedaan sikap yang signifikan terhadap pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi antara penyuluh pertanian yang lulus pendidikan formal S2 dengan penyuluh pertanian yang lulus pendidikan formal S1, serta terdapat perbedaan sikap yang signifikan terhadap pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi antara penyuluh pertanian yang mengikuti pendidikan non-formal kategori tinggi dengan penyuluh pertanian yang mengikuti pendidikan non-formal kategori rendah.

Kata kunci: sikap penyuluh pertanian; identitas kependudukan digital; penyaluran pupuk bersubsidi.

ABSTRACT

This study aims to analyze the attitude of agricultural extension workers toward the use of Digital Population Identity (Indonesian: Identitas Kependudukan Digital [IKD]) in the distribution of subsidized fertilizer in Maros Regency. This research employed a quantitative approach, using a questionnaire as the primary instrument. The samples consisted of 66 agricultural extension workers residing in Maros Regency, selected through purposive sampling. Data analysis was conducted using SPSS for Windows 23, incorporating Spearman's rank correlation analysis and the Mann-Whitney U test. The results indicate as follows: (1) Factors influencing the attitude of agricultural extension workers include personal experience, the influence of significant people, and exposure to mass media, which fall into the low to moderate category; formal education falls into the high category, while non-formal education is in the low category. (2) Agricultural

extension workers generally agree with the use of IKD in the distribution of subsidized fertilizer, both during the registration of farmers eligible for subsidies and during the verification and validation of farmer data when redeeming subsidized fertilizer. (3) Personal experience, the influence of significant people, and exposure to mass media do not have a significant relationship with agricultural extension workers' attitudes toward the use of IKD. However, formal and non-formal education significantly correlate with their attitudes toward IKD implementation. (4) There is no significant difference in attitudes toward IKD use between agricultural extension workers who are digitally adaptive and those who are not. However, there is a significant difference in attitude toward IKD use between agricultural extension workers with an S2 (master's) degree and those with an S1 (bachelor's) degree. Additionally, a significant difference exists between agricultural extension workers who have attended a high level of non-formal education and those with a low level of non-formal education.

Keywords: *attitude of agricultural extension workers; digital population identity; distribution of subsidized fertilizer.*

PENDAHULUAN

Penyuluh pertanian merupakan ujung tombak pembangunan pertanian di Indonesia. Penyuluh pertanian bertugas mendampingi petani mulai dari persiapan tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, panen, hingga pasca panen. Pada saat persiapan tanam, penyuluh pertanian mendampingi petani dalam penyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK), meliputi kebutuhan benih, pupuk, dan pestisida. Pada tahapan berikutnya, penyuluh pertanian mendampingi petani agar proses produksi bisa berlangsung optimal dengan melakukan pemeliharaan tanaman, pemupukan, pemberian air, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman. Pada saat panen, penyuluh pertanian mendampingi petani dalam pemanenan hasil sehingga kehilangan hasil pada saat panen bisa ditekan. Khusus pasca panen, penyuluh pertanian mendampingi petani terkait pemasaran hasil sehingga bisa menguntungkan (Yuniarti et al., 2017), (Indraningsih et al., 2010). Melalui pendampingan penyuluh pertanian kepada petani diharapkan produksi petani bisa meningkat, dan pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani beserta keluarganya.

Selama ini, penyuluh pertanian pada umumnya sudah berhasil meyakinkan

petani bahwa untuk meningkatkan produksi usahataniya maka petani harus mempersiapkan sarana produksi sesuai kebutuhan. Untuk itulah begitu musim tanam tiba, seluruh petani berlomba mempersiapkan seluruh kebutuhan sarana produksinya, mulai dari benih, pupuk, pestisida, hingga alat mesin pengolahan tanah. Diantara empat jenis sarana produksi tersebut, pupuk merupakan sarana produksi yang paling sering menimbulkan masalah bagi petani, baik karena stok yang terbatas, harga tiba-tiba melambung tinggi, maupun adanya pupuk palsu yang beredar di pasaran (Darwis & Supriyati, 2016), (Rachman & Sudaryanto, 2010),

Pemerintah melalui beberapa paket kebijakan, terus berupaya untuk membantu petani mengatasi masalah tersebut. Salah satunya adalah paket kebijakan subsidi pupuk. Kebijakan subsidi pupuk bisa dimaknai sebagai adanya keinginan yang kuat dari pemerintah untuk membantu petani agar mudah memperoleh pupuk bersubsidi (Andini, 2020). Dan selanjutnya dengan pupuk bersubsidi tersebut, petani diharapkan dapat berusaha dengan baik dengan capaian produksi padi (beras) yang tinggi pada setiap musim tanam.

Hal ini penting mengingat kebutuhan beras nasional terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Berdasarkan data (BPS Indonesia, 2018), konsumsi beras

masyarakat Indonesia dalam rentang waktu 2011-2017 adalah berkisar 27,3 juta sampai 29,1 juta ton beras setiap tahun. Pada periode yang sama, produksi beras nasional adalah berkisar 31,3 juta sampai 33,9 juta ton beras. Ini menandakan masih ada surplus beras sekitar 2,2 juta ton. Hanya saja, surplus ini dianggap belum aman bila dijadikan stok beras nasional, terutama pada saat terjadi produksi rendah atau gagal panen akibat bencana banjir, kekeringan, dan atau adanya serangan hama dan penyakit yang eksplosif. Fakta inilah yang dijadikan dasar bagi pemerintah untuk terus mendorong petani untuk meningkatkan produksi padi (beras) melalui kebijakan subsidi pupuk.

Kebijakan subsidi pupuk bisa juga dimaknai bahwa pemerintah berusaha membantu meringankan beban pembiayaan petani, disamping tetap mendorong peningkatan produksinya. Dalam tataran nasional, upaya ini sangat penting mengingat hampir 34,11 juta orang penduduk Indonesia atau 26,03 persen dari jumlah tenaga kerja Indonesia seluruhnya adalah tenaga kerja pertanian dalam arti sempit yang kebanyakan bermukim di pedesaan (Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2021). Artinya, bila upaya ini berhasil, maka sebagian besar tenaga kerja pertanian di Indonesia bisa menikmati peningkatan pendapatan, yang pada akhirnya akan menunjang peningkatan kesejahteraan mereka. Dari sisi pembangunan, keberhasilan demikian tentunya memiliki implikasi yang positif karena bisa menggerakkan roda pembangunan secara keseluruhan.

Melalui kebijakan subsidi pupuk, petani padi khususnya dapat menikmati harga pupuk bersubsidi yang jauh lebih rendah dibanding harga pupuk non-subsidi. Tidak sedikit anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah untuk pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk ini. Dalam periode tahun 2015-2021, subsidi pupuk sebagaimana tertuang dalam APBN berkisar Rp 25,3 triliun sampai Rp 31,3 triliun per tahun (Arifin, 2021). Anggaran subsidi pupuk tertinggi pada tahun 2015 yaitu sebesar

Rp 31,3 triliun, dan kemudian terus menurun hingga pada tahun 2021 anggaran subsidi pupuk menjadi Rp 25,3 triliun, atau mengalami penurunan anggaran sebesar Rp 6,0 triliun (23,7 persen). Alokasi pupuk bersubsidi berdasarkan kemampuan APBN tahun 2021 adalah sebesar 9,0 juta ton. Sementara itu, usulan kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai rencana definitif kebutuhan kelompok tani berbasis elektronik (e-RDKK) pada tahun 2021 adalah 24,3 juta ton. Artinya, terdapat kesenjangan sebesar 15,3 juta ton, antara usulan kebutuhan pupuk dalam e-RDKK dengan alokasi pupuk bersubsidi dalam APBN (Arifin, 2021).

Kesenjangan yang cukup besar antara usulan kebutuhan pupuk kelompok tani dengan alokasi pupuk bersubsidi, tentunya berpotensi menimbulkan terjadinya kekurangan, bahkan kelangkaan pupuk bersubsidi pada beberapa daerah sentra produksi padi di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan, dan lebih khusus di Kabupaten Maros. Di Kabupaten Maros, sebagai salah satu daerah potensial produsen padi (beras) di Sulawesi Selatan, terkait fenomena kesenjangan antara usulan kebutuhan pupuk dengan alokasi pupuk bersubsidi telah berulang kali terjadi dan berakibat kelangkaan pupuk bersubsidi setiap menjelang turun sawah pada beberapa musim tanam terakhir.

Ketersediaan stok pupuk bersubsidi pada tingkat kelompok tani/petani paling sering bermasalah pada periode Desember hingga Januari. Pada Desember hingga Januari, kelompok tani/petani di Kabupaten Maros memasuki musim tanam III (rendengan). Pada periode ini, petani membutuhkan pupuk bersubsidi, namun persediaan pupuk bersubsidi di kios pengecer kadangkala tidak tersedia. Adapun kuota atau jatah pupuk bersubsidi dari Januari sampai sekitar Oktober seluruhnya telah digunakan pada musim tanam I dan musim tanam II. Oleh karena kuota pupuk bersubsidi telah habis digunakan pada musim tanam I dan musim tanam II, maka kebutuhan pupuk bersubsidi musim tanam III kebanyakan

petani menunggu pengadaan pupuk bersubsidi tahun anggaran berikutnya, dalam hal ini umumnya tersedia pada akhir Januari atau awal Pebruari (Halim, 2023).

Permasalahan tersebut semakin diperparah sehubungan dengan masih ditemukannya penyelewengan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Modus operandinya adalah dengan memanfaatkan beberapa kelemahan yang ada di tingkat lapangan, baik saat dilakukan penyaluran pupuk bersubsidi pada tahap distribusi maupun ketika dilakukan penyusunan kebutuhan pupuk bersubsidi pada tahap perencanaan. Pada tahap distribusi, kelemahan mendasar yang umum ditemui adalah rantai pasok yang terlalu panjang (Rachman & Sudaryanto, 2010), (Sularno, Irawan, & Handayani, 2016), (Hendrawan et al., 2011). Rantai pasok yang terlalu panjang dan melibatkan banyak pihak, tentunya menambah peluang untuk terjadinya perembesan pupuk bersubsidi pada saat proses pengangkutan di tingkat lapangan. Pupuk bersubsidi yang seharusnya disalurkan ke kios-kios pengecer resmi, justru sebagian mengalir ke pihak lain yang tidak berhak mendapatkan pupuk bersubsidi. Perembesan ini terutama dipicu oleh tingginya permintaan pupuk di luar sektor pertanian dengan imbalan harga yang cukup besar. Adanya perembesan pupuk bersubsidi di tingkat lapangan, tentunya menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi negara.

Selanjutnya, kelemahan mendasar yang paling sering ditemui pada tahap perencanaan adalah belum optimalnya sistem verifikasi dan validasi data petani calon penerima alokasi pupuk bersubsidi pada saat registrasi (Rachman & Sudaryanto, 2010), (Sularno, Irawan, & Handayani, 2016), (Hendrawan et al., 2011). Verifikasi dan validasi data petani calon penerima alokasi pupuk bersubsidi adalah sangat penting karena tidak semua petani berhak mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pupuk bersubsidi hanya diperuntukkan bagi petani

yang memenuhi kriteria dan persyaratan, antara lain yakni petani yang menggarap lahan sawah dengan luas maksimal 2,0 hektar, memiliki nomor induk kependudukan (NIK), serta mengusahakan komoditi tanaman pangan strategis seperti padi, jagung, dan kedelai. Persyaratan lain yang tidak kalah pentingnya adalah petani yang bersangkutan harus terdaftar sebagai anggota kelompok tani. Melalui kelompok tani di wilayah masing-masing, petani mengajukan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi yang dituangkan dalam bentuk Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok secara elektronik (e-RDKK).

Penggunaan KTP-Fisik (manual) dalam verifikasi dan validasi data petani selama ini masih menemui beberapa kelemahan di tingkat lapangan, diantaranya adalah: (a) bukan petani (petani fiktif) tetapi ikut terdata dalam e-RDKK dan kemudian mendapat alokasi pupuk bersubsidi; (b) petani sudah lama meninggal namun datanya masih tercantum dalam e-RDKK; dan (c) petani mengajukan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi tidak berdasarkan luas lahan riil yang dikelola, sehingga terdapat kemungkinan petani yang memiliki luas lahan lebih dari 2,0 hektar ikut terdaftar sebagai petani calon penerima pupuk bersubsidi melalui e-RDKK (Halim, 2023). Kelemahan pada aspek perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi berpotensi menyebabkan adanya alokasi dan distribusi pupuk bersubsidi yang tidak tepat sasaran.

Kelemahan lainnya adalah kelompok tani kadangkala mengajukan permintaan pupuk bersubsidi di kios pengecer dalam waktu yang hampir bersamaan dengan jumlah cukup besar sesuai e-RDKK. Akibatnya, pelayanan pupuk bersubsidi di kios pengecer seringkali terhambat bila menggunakan cara konvensional (manual). Sebenarnya, untuk mengatasi hal tersebut, pernah dipraktekkan menggunakan kartu tani. Kendalanya adalah kios pengecer pupuk bersubsidi di Kabupaten Maros pada umumnya belum memiliki mesin *electronic data capture*

(EDC) yakni mesin pemindai informasi dan data yang ada didalam kartu tani (Halim, 2023).

Untuk itu, kebijakan pemerintah untuk menunjang kelancaran pelayanan pupuk bersubsidi pada tingkat kelompok tani diperbolehkan menggunakan identitas kartu tanda penduduk (KTP) dalam penebusan pupuk bersubsidi di kios pengecer. Terkait hal tersebut, pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dilengkapi QR Code merupakan salah satu alternatif yang bisa digunakan dalam rangka verifikasi dan validasi data identitas kependudukan (Wibowo et al., 2023), (Widiyarta & Humaidah, 2023), (Sasongko, 2023), termasuk verifikasi dan validasi data petani calon penerima dan penerima pupuk bersubsidi sehingga pemalsuan atau penyalahgunaan data kependudukan bisa diminimalisir.

Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan program unggulan Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standard dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (Sasongko, 2023), (Widiyarta & Humaidah, 2023), (Burhanuddin et al., 2023), (Mubaroq & Fitria, 2021). Program ini dilaksanakan secara serentak diseluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Aktivasi IKD di Kabupaten Maros selama ini masih dalam tahap ujicoba dan sosialisasi. Pada tahap awal, aktivasi IKD lebih banyak diarahkan kepada para aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Maros. Penyuluh pertanian selaku aparatur sipil negara yang bernaung di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros merupakan kelompok sasaran pelaksanaan sosialisasi dan ujicoba Program Aktivasi IKD di Kabupaten Maros. Sikap penyuluh pertanian terhadap beberapa program pemerintah termasuk penerapan digitalisasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan bervariasi antara satu penyuluh pertanian dengan penyuluh pertanian lainnya. Beragam sikap tersebut banyak bergantung pada karakteristik spesifik yang dimiliki masing-masing penyuluh pertanian (Kaliky et al., 2020), (Nurlaili & Wahyuti, 2018), (Primandita et al., 2020).

Sikap penyuluh pertanian terhadap pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Maros belum banyak dikaji dan diteliti. Sehubungan hal tersebut, telah dilakukan penelitian dengan tujuan antara lain yakni: (a) Menganalisis kategori faktor-faktor yang mempengaruhi sikap penyuluh pertanian terhadap pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Maros; (b) Menganalisis sikap penyuluh pertanian terhadap pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Maros; (c) Menganalisis hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi sikap penyuluh pertanian dengan sikap penyuluh pertanian terhadap pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Maros; serta (d) Menganalisis perbedaan sikap penyuluh pertanian terhadap pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Maros berdasarkan beberapa karakteristik penyuluh pertanian meliputi usia, pendidikan formal, dan pendidikan non-formal.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif. Populasi penelitian berjumlah 80 orang meliputi seluruh penyuluh pertanian di Kabupaten Maros dengan penempatan dan wilayah kerja ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Maros Nomor: 821/19/BKPSDM/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang Penempatan dan Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros Tahun 2024, serta berdomisili di

Kabupaten Maros (DPKP-Maros, 2024). Besarnya sampel 66 orang penyuluh pertanian, dipilih secara *proportionate stratified random sampling* berdasarkan kategori sudah melakukan aktivasi IKD berjumlah 40 orang, dan belum melakukan aktivasi IKD berjumlah 26 orang.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah kuesioner. Skala pengukuran menggunakan skala Likert yang dimodifikasi dalam taraf tiga tingkatan yakni setuju, netral, dan tidak setuju. Untuk memperkaya data serta memahami fenomena yang terjadi di lapangan digunakan pula lembar observasi dan dokumentasi. Data kuantitatif diolah menggunakan aplikasi SPSS for windows 23.0 dengan pengodean dan memberikan skor dari jawaban yang ada sesuai daftar pertanyaan dalam kuesioner. Untuk menganalisis hubungan antara faktor-faktor pembentuk sikap dengan sikap penyuluh pertanian terhadap pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Maros digunakan analisis korelasi *Rank Spearman* (Martono, 2010).

Untuk menganalisis perbedaan sikap penyuluh pertanian terhadap pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Maros berdasarkan usia, pendidikan formal, dan pendidikan non-formal penyuluh pertanian maka dilakukan uji beda *Mann-Whitney U Test*. Untuk data kualitatif yang diperoleh dari hasil observasi dan dokumentasi, dianalisis lebih lanjut secara deskriptif untuk memperdalam analisis data-data kuantitatif sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang diamati pada penelitian ini meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan formal, jenis penyuluh pertanian, dan pelaksanaan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (Tabel 1).

Tabel 1
Distribusi Responden Penelitian Menurut Karakteristik yang Diamati

No.	Karakteristik yang Diamati	Distribusi	
		(orang)	(%)
1.	Usia adaptif terhadap teknologi digital		
	- Adaptif (19-39 thn)	19	28,79
	- Belum/tidak adaptif (39 thn)	47	71,21
2.	Jenis kelamin		
	- Laki-laki	30	45,45
	- Perempuan	26	39,39
3.	Pendidikan formal		
	- S2	8	12,12
	- S1	58	87,88
4.	Jenis penyuluh pertanian		
	- PNS	51	77,27
	- PPPK	15	22,73
5.	Pelaksanaan aktivasi IKD		
	- Sudah aktivasi	40	60,61
	- Belum aktivasi	26	39,39

Sumber: Data Primer (diolah), 2024

Pada Tabel 1 tampak bahwa responden kebanyakan tergolong dalam usia belum/tidak adaptif terhadap teknologi digital berjumlah 47 orang (71,21%), sedangkan responden yang tergolong adaptif terhadap teknologi digital berjumlah 19 orang (28,79%). Responden laki-laki berjumlah 30 orang (45,45%), dan responden perempuan berjumlah 36 orang (54,55%). Pendidikan formal responden, terdiri atas jenjang pendidikan sarjana strata dua berjumlah 8 orang (12,12%), dan jenjang pendidikan sarjana strata satu berjumlah 58 orang (87,88%). Responden berasal dari penyuluh pertanian PNS berjumlah 51 orang (77,27%), dan penyuluh pertanian PPPK berjumlah 15 orang (22,73%). Karakteristik berdasarkan aktivasi IKD maka

penyuluh pertanian telah melakukan aktivasi IKD berjumlah 40 orang (60,61%), dan belum melakukan aktivasi IKD berjumlah 26 orang (39,39%).

Faktor-Faktor Pembentuk Sikap

Sikap sosial terbentuk dari adanya interaksi sosial yang dialami oleh individu. Dalam interaksi sosial, individu bereaksi membentuk pola sikap tertentu terhadap berbagai obyek psikologis yang dihadapinya. Di antara berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah pengalaman pribadi, orang lain yang dianggap penting, media massa, pendidikan formal, dan pendidikan informal (Azwar, 2022).

Tabel 2
Distribusi Responden Berdasarkan Faktor-Faktor Pembentuk Sikap

No.	Faktor pembentuk sikap	Kategori	Skor	Distribusi	
				(orang)	(%)
1.	Pengalaman pribadi	Tinggi	25,0-37,0	7	10,61
		Sedang	13,0-24,9	27	40,91
		Rendah	1,0-12,9	32	48,48
2.	Pengaruh orang lain yang dianggap penting	Tinggi	9,0-10,0	5	7,58
		Sedang	7,0-8,0	20	30,30
		Rendah	5,0-6,0	41	62,12
3.	Pendidikan formal	Tinggi	3	8	12,12
		Sedang	2	58	87,88
		Rendah	1	0	0,0
4.	Pendidikan non-formal	Tinggi	5,0-6,0	7	10,61
		Sedang	4,0-4,9	49	74,24
		Rendah	3,0-3,9	10	15,15
5.	Terpaan media massa	Tinggi	9,0-10,0	5	7,58
		Sedang	7,0-8,0	20	30,30
		Rendah	5,0-6,0	41	62,12

Sumber: Analisis Data primer (2024), diolah

Pengalaman pribadi responden mendampingi dan membina petani dalam kegiatan usahatani termasuk salah satunya dalam

perencanaan kebutuhan dan penyaluran pupuk bersubsidi melalui kelompok tani bervariasi mulai dari kategori tinggi, sedang, dan rendah.

Pada Tabel 2 tampak bahwa kebanyakan responden yang memiliki pengalaman dengan kategori rendah dalam mendampingi dan membina petani di lapangan berjumlah 32 orang (48,48%), kategori sedang berjumlah 27 orang (40,91%), dan kategori tinggi berjumlah 7 orang (10,61%). Pengalaman pribadi yang dialami responden pada saat mendampingi dan membina petani tentunya sedikit banyak akan mempengaruhi sikap responden terhadap program/kegiatan yang akan dilaksanakan dan ditujukan kepada petani seperti pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani yang berhak menerima.

Pengaruh orang lain yang dianggap penting bagi responden mencakup atasan langsung, atasan tidak langsung, teman sejawat, dan orang yang dianggap pentingnya lainnya dapat diartikan bahwa peran orang lain yang berpengaruh pada sikap responden terhadap pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Pada Tabel 2 tampak bahwa pengaruh orang lain yang dianggap penting ternyata kebanyakan responden tergolong kategori rendah berjumlah 41 orang (62,12%), kategori sedang berjumlah 20 orang (30,30%), dan kategori rendah berjumlah 5 orang (7,58%). Bentuk dukungan yang diberikan oleh orang-orang yang dianggap penting diantaranya melalui ajakan untuk menggunakan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Bentuk lainnya adalah saran untuk mengikuti pelatihan atau penyuluhan sehingga bisa memahami tujuan, pelaksanaan, dan manfaat program tersebut.

Tingkat pendidikan formal responden adalah kebanyakan lulusan tingkat pendidikan sarjana strata satu (S1) dan sisanya adalah lulusan tingkat pendidikan sarjana strata dua (S2). Pada Tabel 2 tampak bahwa tingkat pendidikan formal responden didominasi lulusan tingkat pendidikan jenjang sarjana strata satu (S1) berjumlah 58 orang (87,88%), dan lulusan tingkat pendidikan jenjang sarjana strata dua berjumlah 8 orang (12,12%). Tingkat pendidikan formal responden dengan

kategori sedang hingga tinggi, tentunya telah melalui beberapa jenjang pendidikan yang dapat berperan dalam menentukan sikap terkait penggunaan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi, baik tujuan, pelaksanaan, maupun manfaatnya.

Pendidikan non-formal adalah pendidikan yang diperoleh responden di luar pendidikan formal seperti pelatihan ataupun penyuluhan terkait program pemanfaatan IKD dan penyaluran pupuk bersubsidi. Pada Tabel 2 tampak bahwa pendidikan non-formal responden kebanyakan termasuk kategori sedang berjumlah 49 orang (74,24%), sedangkan kategori rendah, dan kategori tinggi masing-masing secara berturut-turut berjumlah 10 orang (15,15%) dan 5 orang (10,61%). Artinya, responden dominan belum mengikuti pelatihan ataupun penyuluhan terkait program pemanfaatan IKD dan penyaluran pupuk bersubsidi ataupun sejenisnya termasuk kategori sedang.

Terpaan media massa bisa berupa surat kabar (koran), siaran radio, siaran televisi, majalah/bulletin, ataupun internet dan telepon seluler/smartphone yang memberikan pemberitaan atau informasi terkait program pemanfaatan IKD dan penyaluran pupuk bersubsidi. Pada Tabel 2 tampak bahwa terpaan media massa yang dialami responden kebanyakan termasuk kategori rendah berjumlah 41 orang (62,12%), selanjutnya kategori sedang berjumlah 20 orang (30,30%), dan kategori tinggi hanya berjumlah 5 orang (7,58%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden mempunyai minat yang rendah dalam menyimak pemberitaan media massa yang ada, terutama terkait pemberitaan pemanfaatan IKD dan penyaluran pupuk bersubsidi.

Sikap Penyuluh Pertanian Terhadap Pemanfaatan IKD dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Sikap adalah kecondongan evaluatif terhadap suatu obyek atau subyek yang

memiliki konsekuensi yakni bagaimana seseorang berhadapan dengan obyek sikap (Van Den Ban & Hawkins, 1999). Sikap

penyuluh pertanian terhadap pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3
Distribusi Jumlah Responden Berdasarkan Sikap Penyuluh Pertanian Terhadap Pemanfaatan IKD dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Kategori Sikap Penyuluh Pertanian	Skor	Distribusi	
		(orang)	(%)
Setuju	32,1-38,0	47	71,21
Netral	26,1-32,0	13	19,70
Tidak Setuju	20,0-26,0	6	9,09
Jumlah	-	66	100,00

Sumber: Analisis Data Primer (diolah), 2024

Berdasarkan Tabel 3 tampak bahwa mayoritas responden setuju terhadap pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Secara umum, kebanyakan dari responden menyatakan penilaian mendukung/setuju terhadap pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi yang diharapkan

mampu mengatasi beberapa permasalahan selama ini seperti penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Adapun penilaian/sikap responden terhadap penggunaan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4
Distribusi Jumlah Responden Berdasarkan Sikap Penyuluh Pertanian Terhadap Pemanfaatan IKD dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Pemanfaatan IKD	Kategori Sikap Penyuluh Pertanian	Skor	Distribusi	
			(orang)	(%)
Pendataan petani calon penerima alokasi pupuk bersubsidi	Setuju	14,0-16,0	37	56,06
	Netral	11,1-13,0	20	30,30
	Tidak Setuju	9,0-11,0	9	13,64
Verifikasi dan validasi data petani saat penebusan pupuk bersubsidi	Setuju	10,1-12,0	40	60,61
	Netral	8,1-10,0	20	30,30
	Tidak Setuju	6,0-8,0	6	9,09

Sumber: Analisis Data Primer (2024), diolah

Berdasarkan Tabel 4 tampak bahwa sikap penyuluh pertanian terhadap pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi, baik pada saat pendataan petani calon penerima alokasi pupuk bersubsidi, serta verifikasi dan validasi data petani saat penebusan pupuk

bersubsidi, umumnya responden tergolong setuju atau mendukung. Penyuluh pertanian yang setuju terhadap pemanfaatan IKD pada saat pendataan petani calon penerima alokasi pupuk bersubsidi terdapat 37 orang penyuluh pertanian atau 56,06%. Penggunaan IKD

dalam penyaluran pupuk bersubsidi bertujuan yakni: (a) mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan secara umum, termasuk IKD bagi petani calon penerima dan penerima pupuk bersubsidi; (b) untuk meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi warga masyarakat, termasuk bagi petani calon penerima dan penerima pupuk bersubsidi; (c) untuk mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital khususnya terkait pelayanan penyaluran pupuk bersubsidi; serta (d) untuk mengamankan kepemilikan IKD melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data.

Berdasarkan Tabel 4 tampak bahwa sikap penyuluh pertanian terhadap pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi khususnya pada saat verifikasi dan validasi data petani untuk penebusan pupuk bersubsidi, dominan tergolong setuju atau mendukung. Penyuluh pertanian yang setuju terhadap pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi khususnya pada saat verifikasi dan validasi data petani untuk penebusan pupuk bersubsidi terdapat 40 orang penyuluh pertanian atau 60,61%. Pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi khususnya pada saat

verifikasi dan validasi data petani untuk penebusan pupuk bersubsidi dimaksudkan antara lain yakni: (1) untuk pembuktian kepemilikan identitas kependudukan digital melalui verifikasi data; (2) untuk autentikasi identitas melalui kode verifikasi, dan QR code untuk pembuktian kepemilikan identitas kependudukan digital; dan (3) untuk otorisasi identitas yang merupakan hak otorisasi pemilik identitas kependudukan digital agar dapat diakses oleh pengguna data.

Hubungan antara Faktor Pembentuk Sikap dengan Sikap Penyuluh Pertanian Terhadap Penggunaan IKD dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Hubungan antara faktor-faktor pembentuk sikap dengan sikap penyuluh pertanian terhadap pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi menunjukkan bahwa pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting dan terpaan media massa tidak berpengaruh nyata pada sikap penyuluh pertanian terhadap pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Pendidikan formal dan pendidikan non-formal berpengaruh nyata pada sikap penyuluh pertanian terhadap pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi (Tabel 5).

Tabel 5
Hubungan antara Faktor Pembentuk Sikap dengan Sikap Penyuluh Pertanian Terhadap Pemanfaatan IKD dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Faktor Pembentuk Sikap	Sikap Penyuluh Pertanian Terhadap Pemanfaatan IKD dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi (Y_{tot})		
	r_s	\square value	\square 0,05
Pengalaman pribadi (X1)	-0,044	0,724	Non-signifikan
Pengaruh orang lain yang dianggap penting (X2)	0,189	0,128	Non-signifikan
Pendidikan formal (X3)	0,399**	0,001	Signifikan
Pendidikan non-formal (X4)	0,441**	0,000	Signifikan
Terpaan media massa (X5)	0,079	0,528	Non-signifikan

Sumber: Analisis Data Primer (2024), diolah

Selanjutnya, hubungan antara faktor-faktor pembentuk sikap dengan sikap penyuluh pertanian terhadap pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi, baik pada saat

pendataan petani calon penerima alokasi pupuk bersubsidi (Y1), serta verifikasi dan validasi data petani saat penebusan pupuk bersubsidi (Y2), ditunjukkan pada Tabel 6.

Tabel 6
Hubungan antara Faktor Pembentuk Sikap dengan Sikap Penyuluh Pertanian Terhadap Pemanfaatan IKD dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi (Y1 dan Y2)

Faktor Pembentuk Sikap	Sikap Penyuluh Pertanian Terhadap Pemanfaatan IKD dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi (Y1 dan Y2)			
	(Y1)		(Y2)	
	r_s	ρ value	r_s	ρ value
X1	0,022	0,861	-0,163	0,192
X2	0,180	0,148	0,112	0,371
X3	0,292*	0,017	0,254*	0,040
X4	0,346**	0,004	0,059	0,637
X5	0,017	0,892	-0,128	0,305

Sumber: Analisis Data Primer (2024), diolah

Keterangan:

* : signifikan pada $\alpha = 0,05$

** : signifikan pada $\alpha = 0,01$

Hubungan antara faktor pembentuk sikap dengan sikap penyuluh pertanian terhadap pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi khususnya pada saat pendataan petani calon penerima alokasi pupuk bersubsidi menunjukkan bahwa pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting dan terpaan media massa tidak berpengaruh nyata pada sikap penyuluh pertanian terhadap pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi khususnya pada saat pendataan petani calon penerima alokasi pupuk bersubsidi. Sedangkan, pendidikan formal berpengaruh sangat nyata pada sikap penyuluh pertanian terhadap pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi khususnya pada saat pendataan petani calon penerima alokasi pupuk bersubsidi.

Hubungan antara faktor pembentuk sikap dengan sikap penyuluh pertanian terhadap

pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi khususnya pada saat verifikasi dan validasi data petani untuk penebusan pupuk bersubsidi menunjukkan bahwa pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting, pendidikan non-formal, dan terpaan media massa tidak berpengaruh nyata pada sikap penyuluh pertanian terhadap pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi khususnya pada saat verifikasi dan validasi data petani untuk penebusan pupuk bersubsidi. Sedangkan, pendidikan formal berpengaruh nyata pada sikap penyuluh pertanian terhadap pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi khususnya pada saat verifikasi dan validasi data petani untuk penebusan pupuk bersubsidi.

Perbedaan Sikap Penyuluh Pertanian Terhadap Pemanfaatan IKD dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Uji perbedaan sikap merupakan uji yang dilakukan untuk melihat apakah terdapat

perbedaan sikap penyuluh pertanian terhadap pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan beberapa karakteristik penyuluh pertanian yang digunakan sebagai

indikator pembanding. Beberapa karakteristik tersebut antara lain usia, pendidikan formal, dan pendidikan non-formal (Tabel 7).

Tabel 7
Hasil Analisis Uji Beda U-Mann Whitney Berdasarkan Beberapa Karakteristik Penyuluh Pertanian Meliputi Usia, Pendidikan Formal, dan Pendidikan Non-Formal

Indikator	ρ value	α 0,05
Usia	0,758	Non-signifikan
Pendidikan formal	0,012*	Signifikan
Pendidikan non-formal	0,016*	Signifikan

Sumber: Analisis Data Primer (2024), diolah

Dalam analisis perbedaan sikap berdasarkan usia responden, penyuluh pertanian dikelompokkan dalam dua kelompok yakni penyuluh pertanian yang tergolong usia adaptif teknologi digital (19-39 tahun), dan kelompok penyuluh pertanian yang tergolong usia tidak adaptif teknologi digital (\geq 39 tahun). Berdasarkan hasil analisis sebagaimana tertera pada Tabel 7 dapat diketahui bahwa ρ value adalah 0,758. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan sikap yang nyata terhadap pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi antara penyuluh pertanian yang termasuk dalam kelompok usia tidak adaptif teknologi digital dengan penyuluh pertanian yang termasuk dalam kelompok usia adaptif teknologi digital.

Dalam analisis perbedaan sikap berdasarkan pendidikan formal, penyuluh pertanian dikelompokkan dalam dua kelompok yakni penyuluh pertanian yang telah menempuh jenjang pendidikan dan dinyatakan lulus sarjana strata dua (S2), dan kelompok berikutnya adalah penyuluh pertanian yang menempuh jenjang pendidikan dan dinyatakan lulus sarjana strata satu (S1). Berdasarkan hasil analisis sebagaimana tertera pada Tabel 7 dapat diketahui bahwa ρ value adalah 0,012. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa terdapat perbedaan sikap yang nyata terhadap pemanfaatan IKD dalam penyaluran

pupuk bersubsidi antara penyuluh pertanian yang lulusan pendidikan formal S2 dengan penyuluh pertanian lulusan pendidikan S1.

Dalam analisis perbedaan sikap berdasarkan pendidikan non-formal, penyuluh pertanian dikelompokkan dalam dua kelompok yakni penyuluh pertanian yang telah mengikuti kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan kategori tinggi, dan kelompok berikutnya adalah penyuluh pertanian yang telah mengikuti kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan kategori rendah. Berdasarkan hasil analisis sebagaimana tertera pada Tabel 7 dapat diketahui bahwa ρ value adalah 0,016. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa terdapat perbedaan sikap yang nyata terhadap pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi antara penyuluh pertanian yang telah mengikuti kegiatan pelatihan dan penyuluhan kategori tinggi dengan penyuluh pertanian yang telah mengikuti kegiatan pelatihan dan penyuluhan kategori rendah.

Analisis/Pembahasan Hasil Penelitian

Kebanyakan penyuluh pertanian menyatakan penilaian yang mendukung/setuju terhadap pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Lebih dari 70,0 persen responden menyatakan setuju terhadap pemanfaatan IKD dalam penyaluran

pupuk bersubsidi. Sikap penyuluh pertanian yang setuju terhadap pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi banyak dipengaruhi oleh faktor pembentuk sikap yang mencakup antara lain pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting, pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan terpaan media massa.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan faktor pembentuk sikap yakni pendidikan formal dan pendidikan non-formal memiliki hubungan yang signifikan dengan sikap penyuluh pertanian terhadap pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi dengan nilai korelasi Spearman (r_s) berturut-turut adalah 0,399 (kategori rendah/lemah) dan 0,441 (kategori rendah/lemah). Hubungan antara pendidikan formal yang signifikan serta berkorelasi positif dengan sikap penyuluh pertanian terhadap pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi menandakan bahwa pemanfaatan IKD akan lebih mudah diterima oleh mereka yang berpendidikan dengan kategori tinggi. Sebaliknya, mereka yang pendidikannya lebih rendah cenderung memberikan penilaian tidak setuju karena belum mengetahui dan memahami dengan jelas urgensi dari pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

Pada Tabel 6 tampak bahwa pendidikan formal memiliki hubungan yang signifikan dan berkorelasi positif dengan sikap penyuluh pertanian terhadap pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi, baik pada saat pendataan petani calon penerima alokasi pupuk bersubsidi maupun pada saat verifikasi dan validasi data petani untuk penebusan pupuk bersubsidi, dengan nilai korelasi Spearman (r_s) berturut-turut adalah 0,292 (kategori rendah/lemah) dan 0,254 (kategori rendah/lemah). Dari hasil ini dapat dikemukakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan formal maka pemahaman terhadap urgensi pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi cenderung semakin baik. Pemahaman yang baik berakibat pada munculnya penilaian

yang baik sehingga mereka tidak ragu-ragu menyatakan setuju terhadap pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi, baik pada saat pendataan petani calon penerima alokasi pupuk bersubsidi maupun pada saat verifikasi dan validasi data petani untuk penebusan pupuk bersubsidi.

Hal yang sama berlaku untuk pendidikan non-formal. Hubungan antara pendidikan non-formal yang signifikan serta berkorelasi positif dengan sikap penyuluh pertanian terhadap pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi menandakan bahwa pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi akan lebih mudah diterima oleh mereka yang telah mengikuti kegiatan pelatihan dan kegiatan penyuluhan dengan kategori tinggi terkait program IKD dan penyaluran pupuk bersubsidi, atau sejenisnya. Sebaliknya, bagi mereka yang belum mengikuti kegiatan pelatihan dan kegiatan penyuluhan cenderung memilih bersikap netral sehingga tidak diketahui dengan jelas apakah setuju atau tidak setuju dengan pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Bahkan, bisa jadi mereka pada dasarnya tidak setuju karena belum memahami secara utuh urgensi dari penggunaan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

Pada Tabel 6 tampak bahwa pendidikan non-formal memiliki hubungan yang sangat signifikan dan berkorelasi positif dengan sikap penyuluh pertanian terhadap pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi khususnya pada saat pendataan petani calon penerima pupuk bersubsidi, dengan nilai korelasi Spearman (r_s) adalah 0,346 (kategori rendah/lemah). Dari hasil ini dapat dikemukakan bahwa kegiatan pelatihan dan kegiatan penyuluhan sangat menentukan apakah seorang penyuluh pertanian menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi khususnya pada saat pendataan petani calon penerima alokasi pupuk bersubsidi. Berdasarkan hasil penelitian, sikap responden terhadap pemanfaatan IKD dalam

penyaluran pupuk bersubsidi berturut-turut adalah setuju (56,06%), netral (30,30%), dan tidak setuju (13,64%).

Berdasarkan fenomena diatas dapat dikemukakan bahwa perlu adanya sosialisasi terkait pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi yang lebih intensif agar bisa dipahami dan dapat diterima dengan baik. Untuk tahap awal, sosialisasi ini lebih diarahkan lewat jalur pendidikan formal seperti jenjang perguruan tinggi dan sekolah menengah atas (sederajat). Sosialisasi pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi yang intensif bagi para mahasiswa perguruan tinggi dan siswa sekolah menengah atas (sederajat) cenderung lebih mudah dilakukan karena usia mereka pada umumnya tergolong usia yang adaptif terhadap teknologi digital. Melalui para mahasiswa dan siswa yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi dan bahkan telah memahami urgensi penggunaan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi diharapkan dapat ditularkan kepada keluarga mereka masing-masing yang memiliki latar belakang petani.

Upaya lain yang bisa dilakukan di tingkat lapangan adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten bekerjasama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten melakukan kegiatan pelatihan dan penyuluhan terkait pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Melalui kegiatan pelatihan dan kegiatan penyuluhan ini diharapkan para penyuluh pertanian dapat memperoleh informasi yang utuh dan lengkap terkait kepentingan penggunaan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Penyuluh pertanian dengan tugas pokok melakukan pembinaan dan pendampingan para petani di wilayah kerjanya masing-masing dapat mentransfer pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh pada saat mengikuti kegiatan pelatihan dan penyuluhan pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Transfer pengetahuan dan keterampilan ini tidak saja bagi petani bersangkutan, tetapi juga berlaku

bagi segenap keluarganya, termasuk putra-putrinya yang tergolong petani milenial.

Tentunya, dukungan semua pihak terkait terutama pihak-pihak yang dianggap penting oleh para penyuluh pertanian dan petani memiliki peran yang sangat menentukan untuk keberhasilan pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Keberhasilan tersebut selanjutnya bisa dijadikan sebagai momentum dalam memberlakukan IKD sebagai autentikasi identitas dalam penyaluran pupuk bersubsidi, dimana selama ini masih menggunakan KTP-fisik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Faktor-faktor pembentuk sikap penyuluh pertanian antara lain: pengalaman pribadi, pengaruh orang yang dianggap penting, dan terpaan media massa termasuk dalam kategori rendah sampai sedang, pendidikan formal termasuk kategori tinggi, dan pendidikan non-formal termasuk kategori rendah; (2) Penyuluh pertanian menyatakan sikap setuju terhadap pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi, baik pada saat pendataan petani calon penerima alokasi pupuk bersubsidi maupun verifikasi dan validasi data petani saat penebusan pupuk bersubsidi; (3) Pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap, dan terpaan media massa tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan sikap penyuluh pertanian terhadap pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi, pendidikan formal dan pendidikan non-formal memiliki hubungan yang signifikan dengan sikap penyuluh pertanian terhadap pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi; serta (4) Tidak terdapat perbedaan sikap terhadap pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi antara penyuluh pertanian yang memiliki usia tergolong adaptif teknologi digital dengan penyuluh pertanian

yang memiliki usia tergolong tidak adaptif teknologi digital, terdapat perbedaan sikap yang signifikan terhadap pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi antara penyuluh pertanian yang lulus pendidikan formal S2 dengan penyuluh pertanian yang lulus pendidikan formal S1, serta terdapat perbedaan sikap yang signifikan terhadap pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi antara penyuluh pertanian yang mengikuti pendidikan non-formal kategori tinggi dengan penyuluh pertanian yang mengikuti pendidikan non-formal kategori rendah. Perlu diadakan kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan penyuluhan terkait pemanfaatan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada penyuluh pertanian sehingga penyuluh pertanian dapat memahami urgensi penggunaan IKD dalam penyaluran pupuk bersubsidi secara utuh dan lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, M.. (2020). *Tantangan & Perkembangan Kebijakan Anggaran Subsidi Pupuk*. <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/analisis-ringkas-cepat/public-file/analisis-ringkas-cepat-public-29.pdf>
- Arifin, B. (2021). *Pertanian Bantalan Resesi: Resiliensi Sektor Selama Pandemi Covid-19*. INDEF.
- Azwar, S. (2022). *Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya* (3rd ed.). Pustaka Pelajar.
- BPS Indonesia. (2018). *Statistik Indonesia 2018*. <https://www.bps.go.id/tion/2018/07/03/5a963c1ea9b0fed6497d0845/statistik-indonesia-2018.html>
- Burhanuddin, A., Nugraha, F., Fithri, D. L., Handayani, P. K., & Susanti, N. (2023). Pemanfaatan Teknologi QR Code untuk Sistem Informasi Kependudukan di Desa Pilangrejo. *SITECH: Sistem Informasi Dan Teknologi*, 6(2), 85–92.
- Darwis, V., & Supriyati, N. (2016). Subsidi Pupuk: Kebijakan, Pelaksanaan, dan Optimalisasi Pemanfaatannya. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 11(1), 45. <https://doi.org/10.21082/akp.v11n1.2013.45-60>
- DPKP-Maros. (2024). *Penempatan dan Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros Tahun 2024*.
- Halim, A. (2023). *Kartu Tani dan Pupuk Bersubsidi: Kajian Pemanfaatan pada Kelompok Tani di Kabupaten Maros* (U. Nain (ed.)). Penerbit Adab.
- Hendrawan, D. S., Daryanto, A., Sanim, B., & Siregar, H. (2011). Analisis Kebijakan Subsidi Pupuk: Penentuan Pola Subsidi dan Sistem Distribusi Pupuk di Indonesia. *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, 8(2), 85–96.
- Indraningsih, K. S., Sugihen, B. G., Tjiptoprano, P., Asngari, P. S., & Wijayanto, H. (2010). Kinerja Penyuluh dari Perspektif Petani dan Ekstensi Penyuluh Swadaya Sebagai Pendamping Penyuluh Pertanian. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, 8(4), 303–321.
- Kaliky, R., Subejo, Sabila, A., & Handayani, A. W. (2020). Hubungan Persepsi dan Sikap Penyuluh Pertanian Terhadap Minat Penggunaan Aplikasi SI Katam Terpadu Berbasis Website di Yogyakarta. *Jurnal Kawistara*, 10(3), 368–377.
- Martono, N. (2010). *Statistik Sosial, Teori dan Aplikasi Program SPSS*. Gava Media.
- Mubarq, H., & Fitria, N. J. L. (2021). Inovasi QR Code Pada Pencetakan Dokumen Data Penduduk Sebagai Wujud Penerapan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(2), 209–220.
- Nurlaili, & Wahyuti, U. (2018). Sikap Penyuluh Pertanian Terhadap UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Malang Jawa Timur. *Jurnal Agriekstensia*, 42(1), 17–30.

- Primandita, F., Suwanto, S., & Sutarto, S. (2020). Sikap Petani Terhadap Program Asuransi Usahatani Padi (Autp) Di Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo. *AGRITEXTS: Journal of Agricultural Extension*, 42(1), 17. <https://doi.org/10.20961/agritexts.v42i1.43305>
- Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. (2021). Statistik Ketenagakerjaan Sektor Pertanian (Agustus 2021). *Kementrian Pertanian*, 68(1), 122.
- Rachman, B., & Sudaryanto, T. (2010). IMPACTS AND FUTURE PERSPECTIVES OF FERTILIZER POLICY IN INDONESIA Dampak dan Perspektif Kebijakan Pupuk di Indonesia Fertilizer has a significant role in increasing agricultural production , productivity , farmers ' income , and its contributions to natio. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 8(3), 193–205.
- Sasongko, R. W. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Bandung. *Jurnal Registratie*, 5(1), 69–86.
- Sularno, Irawan, & Handayani, N. (2016). ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN KARAWANG JAWA BARAT. *Jurnal Agrosains Dan Teknologi*, 1(2), 73–87.
- Van Den Ban, A. W., & Hawkins, H. S. (1999). *Penyuluh Pertanian*. Kanisius.
- Wibowo, N. C. H., Khaq, A. M. I., & Nur'aini, S. (2023). Pengembangan Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Desa Papasan dengan QR Code Sebagai Validasi Dokumen. *Walisongo Journal of Information Technology*, 5(1), 27–40.
- Widiyarta, A., & Humaidah, I. (2023). Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Mendorong Digitalisasi Di Kelurahan Jepara Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), 43–51.
- Yuniarti, L., Mariati, R., & Duakaju, N. N. (2017). Peranan Penyuluh Pertanian Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kelurahan Sambutan Kota Samarinda. *Jurnal Ekonomi Pertanian & Pembangunan*, 14(2), 1–12.